

DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)

Hastu Sarkoro
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta
hastusarkoro58@gmail.com

Zulfikar
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta
zulfikar@ums.ac.id

ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine the significant impact of Local Government Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Original Local Government Revenue in Human Development Index at Province Governance in Indonesia. The method of this research is purposive sampling with 33 province as a sample for every year from 34 province at Indonesia for 2012-2014 period. This research utilizes secondary data. The data are taken from the website BPS Statistic Indonesia (www.bps.go.id). The data which is analyzed in this research are collected through the realitation revenue and expenditure of provincial government. The data which have already collected are processed with classic assumption test before hypothesis test. Hypothesis test in this research use multiple regression with *t* test, *F* test and coefficient determination test. The result of this research show that partially Local Government Expenditure and Original Local Government Revenue have a positive significant impact to the Human Development Index. Whereas, General Allocation Fund and Special Allocation Fund have a negative significant impact to the Human Development Index. Local Government Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Original Local Government Revenue have a positive significant impact to the Human Development Index simultaneously.*

Keywords : *Local Government Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Original Local Government Revenue, Human Development Index*

Pendahuluan

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.

Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan

pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan pertumbuhan suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait

pembangunan manusia. Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM. Pada skala nasional, besaran nilai APBN, baik pendapatan negara dan hibah, serta belanja negara memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Kenaikan anggaran tersebut merupakan indikator tumbuhnya perekonomian Indonesia secara garis besar. Peningkatan anggaran pemerintah tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat melalui APBN-nya, namun juga pada pemerintah daerah melalui APBD-nya. Kenaikan anggaran pada APBD tingkat kabupaten di Indonesia bukan hanya menjadi indikator kemajuan perekonomian daerah, namun juga indikator bahwa kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah semakin baik

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan atas beban APBD. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap Indeks Pembangunan Manusia ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) serta Priambodo (2015). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia), yaitu PAD, DAU dan DAK. Peneliti menambahkan variabel belanja daerah dari penelitian Priambodo (2015) dikarenakan penelitian sebelumnya belanja daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan. Menurut Scott dalam Ardiansyah dan Widiyaningsih 2014, asimetri informasi dibedakan menjadi dua, yakni *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* yaitu jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Sedangkan *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, padahal pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Disamping itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Teori Peacock-Wiseman

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya dalam Priambodo, 2015).

Berdasarkan hasil empiris penyelidikan Alan T. Peacock dan Jack Wiseman menekankan pada pola waktu, didapatkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah bukan bersifat *continous growth*, melainkan seperti tangga rumah, yang istilahnya adalah *steplike*. Mengapa pengeluaran dan penerimaan pemerintah berkembang seperti tangga rumah tersebut, dikarenakan tiga efek yang saling berhubungan meskipun dapat dipisahkan, yaitu *displacement effect*, *inspection effect*, dan *concentration effect*. Kenaikan yang bersifat menanjak disebabkan karena guncangan-guncangan sosial yang besar seperti perang dan depresi. Gangguan tersebut menimbulkan *displacement effect* yang berupa kenaikan pengeluaran dan pajak secara mutlak (Soepangat dalam Priambodo, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. *HDI* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standart kehidupan masyarakat.

Belanja Daerah

Pengertian mengenai belanja didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut maka pengertian mengenai belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam penggunaannya, belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan kelompok belanja sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan belanja langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena

merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer;
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari ; Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti ditunjukkan berikut ini :

Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mengambil data dari situs

www.djpk.kemenkeu.go.id dan situs www.bps.go.id. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian Indeks Pembangunan Manusia dengan variabel independennya pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK dan PAD serta Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitiannya adalah DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah kabupaten dan kota sedang memaksimalkan otonomi daerah di Jawa Tengah sehingga dana perimbangan dan pendapatan asli daerah bisa menjelaskan pembangunan manusia suatu daerah di Jawa Tengah.

Penelitian tentang Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa tahun 2007-2013. Dimana dalam 4 variabel independen yaitu belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Priambodo, 2015). Hal itu terjadi dikarenakan dukungan aktivitas ekonomi khususnya di sektor swasta, maka pendapatan pajak akan tinggi. Tingginya penyerapan pajak akan menghasilkan PAD yang semakin besar yang kemudian dialokasikan ke dalam belanja daerah yang berimbas pada pemanfaatan kesejahteraan masyarakat, contohnya belanja bantuan sosial dan belanja modal.

Penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia pernah Lugastoro (2013) lakukan, menunjukkan hasil bahwa Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM.

Putra dan Ulupui (2015) tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mampu meningkatkan IPM.

Harahap (2011) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Sumatra Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia disebabkan sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan IPM ialah sektor yang mengurangi kesenjangan yaitu sektor perdagangan, tenaga kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor infrastruktur memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam penyusunan anggaran yang diatur dalam UU No. 32/2004, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan proporsional daerah masing-masing. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian Priambodo (2015) menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM sejalan dengan deskripsi diatas. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_1 : Belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. DAU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal. Penelitian Badrudin dan Khasanah (2012) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif

terhadap Indeks Pembangunan manusia. Sementara Setyowati dan Suparwati (2012) menunjukkan penelitian dengan hasil yang sama bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum. Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia. Penelitian lainnya Setyowati dan Suparwati (2012) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 34/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari dalam Setyowati dan Suparwati, 2012).

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, dalam (Setyowati dan

Suparwati, 2012). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :
 H_4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Metode Penelitian

Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (www.bps.go.id).

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

1. Menerbitkan Laporan Keuangan berturut-turut tahun 2012-2014.
2. Dipublikasikan pada website www.bps.go.id.
3. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten tahun 2012-2014
4. Memiliki data yang konsisten dan lengkap terkait Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan kriteria diatas, didapatkan 33 sampel dari 34 populasi yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga jumlah sampelnya 99 (33 dikali 3 tahun).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan yakni buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Variabel Pengukuran

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada 4 variabel berdasarkan booklet IPM metode baru yaitu: Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu :

- $IPM < 60$: IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang

- $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
- $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan besarnya total realisasi belanja daerah dibagi dengan total realisasi pengeluaran daerah. Pengukuran belanja daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prato, Nur Isa (2012). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur belanja daerah:

$$BD = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi total pengeluaran daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran DAU dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAU :

$$DAU = \frac{\text{Total Realisasi DAU}}{\text{Realisasi total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengukuran DAK dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAK :

$$DAK = \frac{\text{Total Realisasi DAK}}{\text{Realisasi total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dari PAD yang merupakan rasio digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya Pendapatan Daerah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur PAD :

$$PAD = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, dinyatakan dengan persamaan:

$$IPM = \alpha + \beta_1 BD + \beta_2 DAU + \beta_3 PDAK + \beta_4 PAD + \varepsilon$$

Keterangan :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
α	= Konstanta
BD	= Belanja Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
E	= <i>error</i>

Pengujian Hipotesis (uji t)

Uji statistik t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 5$ persen, $df = (n-k)$. Kriteria uji t adalah H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, sebaliknya H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemilihan Sampel

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh sampel dari penelitian selama 2012 sampai 2014 adalah sebanyak 33 provinsi se-Indonesia, 1 provinsi tidak masuk sampel yaitu provinsi Kalimantan Utara. Adapun daftar pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Data sampel penelitian

No	Provinsi	No	Provinsi
1	Aceh	18	NTB
2	Sumatera Utara	19	NTT
3	Sumatera Barat	20	Kalimantan Barat
4	Riau	21	Kalimantan Tengah
5	Jambi	22	Kalimantan Selatan
6	Sumatera Selatan	23	Kalimantan Timur
7	Bengkulu	24	Sulawesi Utara
8	Lampung	25	Sulawesi Tengah
9	Bangka Belitung	26	Sulawesi Selatan
10	Kepulauan Riau	27	Sulawesi Tenggara
11	Dki Jakarta	28	Gorontalo
12	Jawa Barat	29	Sulawesi Barat
13	Jawa Tengah	30	Maluku
14	DI. Yogyakarta	31	Maluku Utara
15	Jawa Timur	32	Papua Barat
16	Banten	33	Papua
17	Bali		

Uji Asumsi Klasik

Hasil penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik, dimana dari hasil perhitungan diketahui besar *Kolmogorov-Smirnov* 0,938 dengan signifikansi 0,343 sehingga semua variabel diketahui lebih besar dari α ($p > 0,05$), maka dapat dinyatakan data residual berdistribusi normal atau seluruh data memiliki

sebaran data normal. Hasil uji multikolinieritas diketahui nilai *tolerance* BD sebesar 0,892, DAU sebesar 0,127, DAK sebesar 0,121 dan PAD sebesar 0,603 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa nilai VIF variabel bebas yaitu BD sebesar 1,121, DAU sebesar 7,852, DAK sebesar 8,232 dan PAD sebesar 1,658 kurang dari 10, artinya tidak ada kolerasi antar variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas juga menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam grafik *scatterplot* sebab terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Uji asumsi klasik terakhir yaitu uji autokorelasi. Diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,960 tersebut terletak di antara nilai dU (1,7575) dan 4-dU (2,2425), sehingga dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Ketepatan Model

Uji F

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 20,476 $>$ F_{tabel} (2,47) pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis seperti yang tersaji pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,443 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 44,3% perubahan naik atau turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi se-Indonesia dapat dijelaskan oleh indikator-indikator pendorong terjadinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan, 55,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model regresi berganda yang pada umumnya digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dalam tabel 2 hasil analisis regresi berganda berikut ini:

Tabel 2

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	B	Std. eror
(Constant)	75.677	4.145
BD	-.163	.047
DAU	.047	.050
DAK	-.577	.777
PAD	.144	.023

Dari hasil tabel 2 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$IPM = 75,677 - 0,163 BD + 0,047 DAU - 0,577 DAK + 0,144 PAD + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka interpretasinya adalah Hasil konstanta sebesar 75,677 berarti apabila variabel belanja daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak ada atau sama dengan 0 maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,677. Koefisien variabel Belanja Daerah sebesar -0,163. Hal ini berarti apabila variabel Belanja Daerah naik, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar 0,163.

Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar +0,047. Hal ini berarti apabila variabel Dana Alokasi Umum (DAU) naik, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik sebesar 0,047. Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,577. Hal ini berarti apabila variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) naik, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan turun sebesar 0,577. Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar +0,144. Hal ini berarti apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik, maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik sebesar 0,144.

Uji Hipotesis (uji t)

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T	Sig	Keterangan
(Constant)			
BD	-3.425	.001	Signifikan
DAU	.936	.352	Tidak Signifikan
DAK	-.742	.460	Tidak Signifikan
PAD	6.256	.000	Signifikan
R2	=0,682	F hit	= 20,476
Adjusted R2	=0,443	F tab	= 2,47
T tabel	=1,985		

Sumber : Data Sekunder 2016, Diolah

Berdasarkan hasil uji statistik yang disajikan pada tabel uji hipotesis dapat diinterpretasikan bahwa variabel belanja daerah memiliki t_{hitung} -3,425 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan

bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki t_{hitung} 0,936 dan nilai signifikansi sebesar $0,352 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki t_{hitung} -0,742 dan nilai signifikansi sebesar $0,460 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t_{hitung} 6,256 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel belanja daerah memiliki t_{hitung} -3,425 dan nilai signifikan $0,001 > 0,05$, artinya belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratowo (2012) dan Priambodo (2015) serta Suriyati

(2015). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian, Badrudin dan Khasanah (2011).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel dana alokasi umum memiliki t_{hitung} 0,936 dan nilai signifikan 0,352 > 0,05, artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Tidak adanya pengaruh DAU terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas perekonomian daerah tersebut. Selain itu, DAU sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Ini bisa dilihat dari formulasi DAU yang memasukkan komponen alokasi dasar sebagai komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) dan Adiputra, Yantari, dan Darmada (2015). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel dana alokasi khusus memiliki t_{hitung} -0,742 dan nilai signifikan 0,460 > 0,05, artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara DAK lebih diperuntukkan kepada peningkatan sarana dan prasarana (fisik) dan jumlah DAK jauh lebih kecil dibandingkan dana lainnya, seperti PAD dan DAU.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Adiputra, Yantari, dan Darmada (2015). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis variabel pendapatan asli daerah memiliki t_{hitung} 6,256 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD

sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di tiap-tiap provinsi.

Sesuai dengan semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal, pemerintah provinsi harus lebih fokus dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai belanja daerah. Namun perlu pertimbangkan bahwa upaya-upaya peningkatan PAD juga harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi *trade off* dimana keinginan yang menggebu untuk mendongkrak PAD justru menjadi *disinsentif* yang mematikan potensi ekonomi (investasi) daerah. Kondisi ini terjadi jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi tanpa melihat kemampuan daerah sehingga membuat masyarakat terbebani dan membuat pelaku usaha segan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) dan Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014). Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Anggraini dan Sutaryo (2015).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu Belanja Daerah dan hipotesis keempat (H_4) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H_1 dan H_4 diterima. Sedangkan, hipotesis kedua (H_2) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan hipotesis ketiga (H_3) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H_2 dan H_3 ditolak. Sedangkan, secara simultan bahwa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Daftar Pustaka

- [1] Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [3] Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi*

- Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- [4] Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- [5] Badan Pusat Statistik. 2016. Booklet IPM Metode Baru, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 24 Januari 2016).
- [6] Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- [7] Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [8] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [10] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [11] Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Prestasi* Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.
- [12] Lugastoro, Decta Priton. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- [13] Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3 (2015) : 863-877.
- [14] Harahap, Riva Ubar. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 11 No. 1/Maret 2011.
- [15] Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan* Volume 9, Nomor 1, April 2011 : 23-30
- [16] Pratowo, Nur Isa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.
- [17] Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- [18] Badan Pusat Statistik. 2016. IPM 2010-2014, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 23 Januari 2016).
- [19] Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 23 Januari 2016).
- [20] Suriyati, Desi. 2015. *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012*. *Media Bina Ilmiah* Volume 9 No. 7 Desember 2015.
- [21] Anggarini, Tika dan Sutaryo. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- [22] Sanggelorang, Septian MM, Vekie A. Rume dan Hanly F.DJ. Siwu 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 02 – Edisi Juli 2015.
- [23] Jane, Orphe. 2002. *Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.